



Bawaslu Koordinasikan Masalah Spanduk Politik

● SILVY DIAN SETIAWAN

Bawaslu bersikeras spanduk tersebut tak menyalahi aturan.

YOGYAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di DIY terkait spanduk yang diduga termasuk kampanye terselubung bernuansa Pilpres 2019. Bawaslu DIY melimpahkan wewenang atas tindak lanjut spanduk ini kepada pemkot dan pemkab karena dianggap bukan termasuk sebagai Alat Peraga Kampanye (APK).

Karena tidak termasuk APK, Bawaslu tidak berwenang atas tindak lanjut dari penindakan spanduk tersebut. Spanduk tersebut bertuliskan 'Sultanku Gubernurku, Jokowi Presidenku' yang dipasang di beberapa titik di DIY.

"Kami sudah koordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perizinan Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Di masing-masing kabupaten/kota juga sudah koordinasi antara Bawaslu kabupaten/kota dengan Satpol PP di masing-masing kabupaten/kota," kata Komisioner Divisi Peninda-

kan Pelanggaran Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdaningsih kepada *Republika*, Kamis (31/1).

Pemprov, pemkot, maupun pemkab telah berkomitmen untuk melihat lebih jauh terhadap pemasangan spanduk ini. Sehingga, akan ditertibkan secepatnya melalui Satpol PP masing-masing.

Ia menegaskan, spanduk tersebut tidak termasuk APK. Sebab, tidak ditemukan logo partai maupun nomor urut pasangan calon peserta Pemilu di spanduk tersebut.

Oleh sebab itu, tidak ada kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti spanduk tersebut. "Kewenangan kami sangat terbatas. Kalau itu bukan ranah kampanye, maka kami tidak bisa masuk. Kalau kami paksa masuk, nanti kami bertindak di luar kewenangan kami," kata Sri. Bahkan, Bawaslu menilai spanduk tersebut tidak menyalahi aturan. Sebab, kata-kata yang ada dalam spanduk tidak bernuansa pilpres.

Terkait pernyataan Pemkot Yogyakarta yang menyatakan spanduk tersebut bermuatan politik, ia pun membantah hal tersebut. "Yang ditulis kan Sultanku Gubernurku, faktanya memang Sultan itu gubernur DIY. Kemudian di bawahnya itu kan Jokowi Presidenku, faktanya Jokowi itu memang presiden, sekarang ini masih presiden," kata Sri.

Dengan menyerahkan kewenangan kepada pemkot dan pemkab, pihaknya akan terus melakukan koordinasi. Ia menyebut tetap akan mengawal hingga spanduk-spanduk tersebut ditindaklanjuti hingga ada pencabutan dari pihak pemkot dan pemkab. "Tidak ada kewenangan kami untuk menindak. Karena ini ada yang mempermasalahakan, tentu kita kemudian menindaklanjuti dengan pemda," katanya.

Spanduk tersebut dilaporkan kepada Bawaslu beberapa waktu lalu karena diduga bernuansa Pilpres 2019 dan tidak berizin. Spanduk tersebut dipasang di beberapa titik di kabupaten dan kota di DIY, di antaranya lima titik di Kota Yogyakarta, satu titik di Kabupaten Sleman, dan satu titik di Kabupaten Bantul.

Bawaslu masih menunggu Pemda DIY untuk melakukan penindakan atas spanduk tak berizin yang diduga bernuansa Pilpres 2019. "Saat ini kami menunggu hasil koordinasi Senin kemarin. Pemda berkomitmen untuk melihat lebih jauh pemasangan spanduk itu dan kemungkinan besar akan ditertibkan semua," kata Sri.

Sri mengatakan, pemda tentu memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menertibkan spanduk tersebut. Sehingga tidak dapat langsung ditertibkan saat koordinasi selesai dilakukan beberapa hari lalu.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sat Pol PP | | | |

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005